

Persepsi Petani terhadap Dukungan Pemerintah dalam Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan

(Farmers' Perception to Government Support in Implementing Sustainable Agriculture System)

Ratri Virianita*, Tatie Soedewo, Siti Amanah, Anna Fatchiya

(Diterima Maret 2018/Disetujui Maret 2019)

ABSTRAK

Salah satu faktor yang menghambat adopsi inovasi teknologi pertanian berkelanjutan adalah persepsi petani terhadap inovasi tersebut yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal petani. Di antara faktor-faktor tersebut adalah keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian berkelanjutan yang merupakan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan, menemukan faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani tersebut, dan menghasilkan rekomendasi yang mendukung sistem pertanian berkelanjutan kepada pemerintah dalam rangka pengarusutamaan pertanian berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di empat wilayah Kota/Kabupaten Bogor, yaitu Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Situgede, Desa Benteng, dan Desa Purwasari. Penelitian ini menggunakan metode survei pada 201 orang petani yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani negatif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan (46,3%). Sebagian besar petani (55,7%) memandang pemerintah kurang mendukung penerapan sistem pertanian berkelanjutan, khususnya dalam hal ketersediaan modal usaha (65,7%), jaminan harga pasar hasil usaha tani (58,7%), jaminan harga sarana produksi usaha tani (51,7%), dan kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak) (50,2%). Adapun faktor yang berhubungan dengan persepsi petani tersebut adalah pendidikan formal ($r_s = 0,150$, $P < 0,05$) dan penguasaan lahan ($r_s = -0,154$, $P < 0,05$). Penting bagi pemerintah untuk menyediakan kebutuhan petani berupa modal usaha, jaminan harga pasar hasil usaha tani, jaminan harga sarana produksi usaha tani, dan kelancaran pemasaran sehingga mendukung kelancaran dan keberlanjutan penerapan kegiatan usaha tani tersebut.

Kata kunci: dukungan pemerintah, persepsi petani, sistem pertanian berkelanjutan

ABSTRACT

One of the factors that hinder the adoption of sustainable agriculture technology innovation is the farmers' perception on the innovation, which is influenced by internal and external factors. One of them is the limited availabilities of infra structure and facilities to support sustainable agricultural production, which are external factors. This research was aimed to analyz the farmers' perception on the government support in implementing sustainable agriculture system, to find out factors that are related to the farmers' perception and to produce recommendations that support sustainable agriculture system to the government in the context of sustainable agriculture mainstreaming. This research was conducted in four different areas in Bogor municipality and regency, namely Cimahpar District, Situgede District, Benteng Village, and Purwasari Village. Survey method was used on 201 farmers selected purposively. The results showed that farmers' perception was negative on government support in implementing sustainable agriculture system. Most of the farmers considered that government provided less support to the implementation of sustainable agriculture system (55.7%). Especially, in providing enough capital (65.7%), insurance on farmers' business market (58.7%), insurance on the price of business production facilities (51.7%), and insurance on the market (sold with reasonable price) (50.2%). However, factors that were related to the farmers' perception were formal education ($r_s = 0.150$, $P < 0.05$) and land area ($r_s = -0.154$, $P < 0.05$). Therefore, it is important for the government to provide the farmers' needs, such as sufficient capital, guarantee on market price of farm product, price guarantee for farming production facilities, and market continuity to support sustainable business activities for the continuity of the farmers' business activity application.

Keywords: farmers' perception, government support, sustainable agriculture system

PENDAHULUAN

Berdasarkan rencana strategis 2015–2019 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manu-

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

* Penulis Korespondensi: Email: atru_v@apps.ipb.ac.id

sia Pertanian Kementerian Pertanian (BPPSDM), pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil, dan makmur. Pertanian bermartabat, dalam arti bahwa petani Indonesia diharapkan mempunyai kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian

mandiri, meliputi kemerdekaan dan kedaulatan negara maupun petani dalam segala hal terkait pembangunan pertanian. Pertanian maju, tercermin dari penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling baru pada masanya dan yang memiliki keunggulan, khususnya di bidang pertanian tropika. Pertanian adil, berkaitan dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusaha tani, politik, dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan, dan sosial. Adapun pertanian makmur dicirikan oleh kehidupan semua petani yang serba berkecukupan, yang merupakan hasil dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil (Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2014).

Berkenaan dengan hal itu, pembangunan perekonomian nasional didasarkan pada pembangunan pertanian. Artinya bahwa sektor pertanian menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Sektor pertanian menjadi andalan dalam pembangunan nasional karena menjadi andalan sebagai penyumbang devisa negara. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (2017) menyatakan bahwa kontribusi sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 10,21% pada tahun 2016. Data ini membuktikan kemajuan dan keberhasilan sektor pertanian dalam menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sektor pertanian adalah peran diseminasi inovasi teknologi pertanian dalam pembangunan pertanian (Indraningsih 2017). Inovasi teknologi pertanian bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pertanian, namun hal ini tidak terlepas dari kemampuan petani dalam menerapkan inovasi pertanian tersebut. Oleh karena itu, pentingnya peran penyuluh pertanian bertindak sebagai jembatan dan sekaligus penghantar inovasi teknologi pertanian (Siata 2016).

Petani merupakan produsen pangan dan sekaligus sebagai manajer dalam usaha tani. Semakin meningkatnya kebutuhan pangan, baik dalam segi jumlah maupun kualitas (keamanan dan kesehatan), maka diperlukan kemampuan petani yang andal dalam menerapkan prinsip-prinsip pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ialah sistem pertanian yang secara jangka panjang mampu menjaga lingkungan agar bisa memenuhi kebutuhan pangan dan serat untuk manusia, dapat meningkatkan kualitas lingkungan dalam kebutuhan pertanian, menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin, dan dapat meningkatkan kualitas hidup petani tanpa merusak alam, serta dapat menggunakan sumber daya alam secara terintegrasi secara menyeluruh (www.inspirasipertanian.com).

Kelompok tani bisa menjadi wadah belajar, yaitu sarana untuk bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi berbasis pertanian. Kelompok tani dapat berperan penting dalam menyebarkan informasi dan teknologi yang baru kepada petani lainnya. Cara yang tepat untuk penyebaran informasi ini adalah dengan penyuluhan kelompok. Metode penyuluhan kelompok

lebih tepat guna daripada media massa. Dengan metode ini akan terjadi umpan balik yang dapat mengurangi salah pengertian antara penyuluh dan petani dalam penyampaian informasi. Dalam metode ini, interaksi yang timbul antara petani dan penyuluh akan lebih intensif. Selain itu, petani diajak dan dibimbing secara berkelompok untuk melaksanakan kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerja sama. Untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Peraturan Menteri Pertanian ini menyebutkan tiga arah pengembangan kelompok tani, yaitu 1) Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya (sebagai wadah belajar wahana kerja sama dan unit produksi); 2) Peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis; dan 3) Menguatkan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Seperti yang telah diuraikan di atas, kemampuan penyuluh dalam proses pengembangan kelompok tani dapat disesuaikan dengan arah pengembangan kelompok tani, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat perkembangan kelompok tani sangat dipengaruhi oleh seberapa besar peran penyuluh yang diberikan dalam melakukan pengembangan pada kelompok tani. Namun, jumlah penyuluh pertanian di Indonesia masih belum ideal dan belum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa dari 72.000 desa yang memiliki potensi di bidang pertanian, hanya 44.000 tenaga penyuluh pertanian yang tersedia (Syaifudin 2017). Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan kelompok tani di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor karena di Kabupaten Bogor terdapat 40 kecamatan dan 494 desa, namun penyuluh pertanian hanya ada di setiap kecamatan (Yuwanto 2016). Selain itu, salah satu fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor adalah melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan seperti yang disebutkan dalam Renstra tahun 2013–2018.

Tantangan lainnya perihal pertanian yang dihadapi oleh negara Indonesia, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor ialah lahan pertanian yang semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim, dan keterbatasan air. Keterbatasan air dan lahan yang semakin sempit menyebabkan penerapan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan menjadi penting. Pertanian berkelanjutan, menurut Menteri Pertanian dalam sambutannya pada pertemuan *Governing Council* yang ke-11 CAPSA (*The Centre for the Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture*) di Bogor pada tanggal 12 Februari 2015, bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan dan daerah

tertinggal (Widayadi 2015). Pertanian berkelanjutan dapat menjembatani semua permasalahan tersebut di atas. Pertanian berkelanjutan bisa menghasilkan paling tidak lima keuntungan, yaitu 1) Produksi hasil pertanian yang stabil sepanjang tahun; 2) Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; 3) Hemat biaya; 4) Hasil produk pertanian lebih sehat; dan 5) Terjaganya kelestarian ekologi. Hasil pertanian yang stabil sepanjang tahun membuat petani merasa tenteram karena pendapatannya akan stabil. Kualitas lahan akan tetap terjaga dengan adanya pertanian berkelanjutan. Terlebih lagi petani tidak perlu mengeluarkan banyak biaya karena biaya produksi dapat dikurangi. Dengan terjaganya kualitas lahan maka produknya pun akan lebih sehat. Pada akhirnya kelestarian ekologi pun akan tetap terjaga (Agromaret 2017).

Salah satu masalah yang menghambat produksi pertanian berkelanjutan adalah rendahnya tingkat adopsi petani pada inovasi teknologi pertanian berkelanjutan. Sebenarnya pemerintah telah banyak menghasilkan inovasi teknologi pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga dapat memenuhi kebutuhan petani khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua petani mengadopsi inovasi teknologi pertanian berkelanjutan tersebut. Bisa dikatakan bahwa tingkat adopsi petani atas inovasi teknologi pertanian berkelanjutan masih rendah sehingga produktivitas pertanian belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keberagaman persepsi petani terhadap inovasi teknologi pertanian berkelanjutan tersebut.

Menurut Ramli (2012) terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi persepsi petani terhadap inovasi teknologi pertanian, di antaranya adalah 1) Tingkat pendapatan petani yang relatif rendah; 2) Proses penciptaan inovasi teknologi yang kurang komprehensif; 3) Proses diseminasi inovasi teknologi yang kurang efektif; dan 4) Petani masih menghadapi berbagai masalah, baik internal maupun eksternal. Kendala yang umumnya dihadapi petani secara eksternal ialah minimnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang mendukung penerapan inovasi teknologi pertanian berkelanjutan tersebut. Kurangnya ketersediaan bibit, pupuk, dan pengendalian hama yang ramah lingkungan menghalangi petani yang sudah berkeinginan menerapkan inovasi teknologi pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

Baron dan Brascombe (2014) menyatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang digunakan oleh individu untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Adapun Robbins (2002) mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh oleh individu untuk mengorganisasikan dan

menafsirkan kesan indra mereka dalam pemberian makna terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari proses pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar-gejala yang selanjutnya diproses dalam kognisi (Indraningsih 2017). Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan hasil dari suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima indra sehingga stimulus tersebut dimengerti oleh individu. Stimulus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

Dalam proses persepsi, perhatian merupakan langkah pertama. Walgito (2010) menjelaskan bahwa perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi semua aktivitas individu yang ditujukan ke sesuatu atau sekumpulan objek. Dikatakan oleh Rakhmat (2007) bahwa perhatian merupakan proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran, karena itu dalam melakukan persepsi diperlukan perhatian. Melalui perhatian di dalam proses persepsi, individu akan menerima atau menolak suatu stimulus sehingga stimulus tersebut dianggap positif atau negatif. Hal ini bergantung pada faktor psikologis individu yang menerima stimulus tersebut, seperti sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi (Yuniarti 2015). Faktor psikologis yang paling dominan adalah ekspektasi karena memberikan kerangka berpikir atau *perceptual set* atau *mental set* tertentu yang menyiapkan individu untuk mempersepsi dengan cara tertentu. Ekspektasi dapat mengubah persepsi individu dalam melihat yang diharapkan dari yang terjadi saat ini (Yuniarti 2015). Dengan demikian, dalam penelitian ini perhatian petani ditujukan pada dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Dukungan pemerintah tersebut dilihat dari tersedia atau tidaknya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, peralatan usaha tani yang memadai, kelancaran pemasaran hasil panen dengan harga jual yang layak, tersedia atau tidaknya modal usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha tani berkelanjutan, tersedia atau tidaknya energi (bahan bakar minyak dan listrik) yang menopang kegiatan usaha tani berkelanjutan, dan terjamin atau tidaknya harga sarana produksi pertanian berkelanjutan yang terjangkau oleh petani, serta terjamin atau tidaknya harga pasar hasil usaha tani yang memenuhi kebutuhan petani sehingga menunjang kegiatan usaha tani yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan; 2) Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan; dan 3) Menghasilkan rekomendasi yang mendukung sistem pertanian berkelanjutan kepada pemerintah dalam rangka pengarusutamaan pertanian berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kelurahan Situgede dan Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor, serta Desa Benteng dan Desa Purwasari, Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode survei dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara berstruktur pada 201 orang anggota kelompok tani/wanita tani dari populasi sebanyak 315 orang petani yang tergabung dalam 12 kelompok tani/wanita tani di empat wilayah penelitian, yaitu kelompok tani Saluyu, kelompok wanita tani Sawargi dan Geulis di Kelurahan Situgede; kelompok tani Tani Jaya dan kelompok wanita tani Melati di Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor; dan kelompok tani Cahaya Tani, kelompok wanita tani Puring dan Benteng Sejahtera di Desa Benteng; kelompok tani Bina Mekarsari, Kramatsari, Hegarsari dan Rawasari di Desa Purwasari, Kabupaten Bogor. Pemilihan responden penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa responden merupakan anggota kelompok tani/wanita tani yang aktif dalam kegiatan kelompoknya masing-masing. Adapun responden penelitian terdiri atas 29 dari 59 orang petani di Kelurahan Situgede, 42 dari 63 orang petani di Kelurahan Cimahpar, 38 dari 73 orang petani di Desa Benteng, dan 92 dari 120 orang petani di Desa Purwasari.

Data primer yang dikumpulkan meliputi profil petani dan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Indikator penilaian persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan meliputi ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak), ketersediaan modal usaha, ketersediaan energi (bahan bakar minyak dan listrik), jaminan harga saprodi usaha tani dan jaminan harga pasar hasil usaha tani.

Persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan diukur menggunakan skala Likert dengan memberikan penilaian skor 1 (tidak mendukung), 2 (kurang mendukung), 3 (cukup mendukung), dan 4 (sangat mendukung). Penilaian dengan skala 4 dilakukan sebagai upaya menghindari bias respons dari petani responden. Semua skor petani responden dijumlahkan menjadi satu skor total. Jumlah pernyataan pada skala persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan berjumlah 6 pernyataan sehingga skor maksimum yang diperoleh adalah 24 [4 (nilai maksimum) x 6 pernyataan], sedangkan skor minimum adalah 6 [1 (nilai minimum) x 6 pernyataan]. Batas positif atau negatif persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan diperoleh dari nilai tengah skala. Nilai tengah dari skala persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan ini diperoleh dari setengah jumlah skor maksimum dan minimum pada skala ini, yaitu 15 [$\frac{1}{2}$ (skor maksimum+skor minimum)]. Petani responden yang memperoleh skor >15 dika-

tegorikan sebagai petani responden yang memiliki persepsi positif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Petani responden yang memiliki skor 15 dikategorikan sebagai petani responden yang memiliki persepsi netral terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Adapun petani responden yang memperoleh skor <15 dikategorikan sebagai petani responden yang memiliki persepsi negatif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Analisis data menggunakan analisis korelasi *rank spearman* dengan rumus:

$$rs = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

Keterangan:

rs = Korelasi *rank spearman*

d_i = Selisih setiap *rank*

n = Banyaknya pasangan data

Analisis korelasi *rank spearman* digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Faktor internal dan eksternal petani responden berupa usia, pendidikan formal, penguasaan lahan, dan penghasilan usaha tani diduga berhubungan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Pengolahan data dibantu program *Microsoft Excel 2007* dan *SPSS IBM 21*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Petani di Empat Wilayah Penelitian

Petani di empat wilayah penelitian mencakup responden dari 12 kelompok tani/wanita tani di Kelurahan Cimahpar (kelompok tani Tani Jaya dan kelompok wanita tani Melati), Kelurahan Situgede (kelompok tani Saluyu, kelompok wanita tani Sawargi, dan Geulis), Desa Benteng (kelompok tani Cahaya, kelompok wanita tani Puring, dan Benteng Sejahtera), dan Desa Purwasari (kelompok tani Bina Mekarsari, Kramatsari, Hegarsari dan Rawasari). Kelompok tani/wanita tani yang berjumlah 12 orang tersebut mengusahakan beragam jenis komoditas dan usaha olahan sebagaimana diperlihatkan Tabel 1.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara umum kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh kelompok tani cenderung pada tanaman pangan, sayuran, dan budi daya ikan. Sementara itu, usaha tani yang dilakukan oleh kelompok wanita tani cenderung pada usaha komoditas olahan, seperti olahan makanan ringan dan budi daya tanaman obat keluarga (TOGA). Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa usaha komoditas olahan cenderung menjadi pilihan petani responden di wilayah kota, dibanding petani responden di wilayah desa yang masih dominan melakukan usaha tani dalam budi daya tanaman pangan dan sayuran.

Adapun profil petani dalam penelitian ini yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan formal, penguasaan lahan, penghasilan usaha tani, penghasilan non-usaha tani, dan pengeluaran berdasarkan empat wilayah penelitian disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat bahwa petani yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan sebesar 65,7% dibandingkan perempuan sebesar 34,3%. Data ini menunjukkan bahwa pelaku utama dalam kegiatan usaha tani masih didominasi oleh laki-laki. Namun demikian, bukan berarti perempuan tidak menjadi pelaku usaha tani. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha tani lebih dominan berkecimpung dalam bidang komoditas olahan dan budi daya tanaman obat keluarga (TOGA) (Tabel 1). Hayati *et al.* (2015) mengemukakan bahwa petani perempuan cenderung mempunyai kemampuan dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Tabel 2 menunjukkan bahwa pelaku usaha tani

berjenis kelamin laki-laki masih dominan di Kelurahan Situgede adalah sebesar 52,6% dan Desa Purwasari adalah sebesar 93,5%. Sementara itu, di Kelurahan Cimahpar dan Desa Benteng pelaku usaha tani didominasi oleh kaum perempuan, yaitu sebesar 52,4 dan 79,3%. Akses yang lebih mudah menjangkau perkotaan memungkinkan kaum laki-laki di Kelurahan Cimahpar dan Desa Benteng untuk beralih profesi pada pekerjaan yang lebih menguntungkan.

Dalam hal usia Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar petani berada dalam kategori usia tua, yaitu di atas 50 tahun sebesar 52,7%. Data ini sejalan dengan Suharyanto *et al.* (2017) yang menemukan struktur usia petani rata-rata berusia 56 tahun. Namun demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan usia produktif dalam rentang usia 15–60 tahun sehingga petani masih dapat diharapkan memberikan kinerja yang optimal dalam kegiatan usaha taninya,

Tabel 1 Jenis komoditas dan usaha olahan yang dilakukan oleh kelompok tani/wanita tani di Kota dan Kabupaten Bogor, 2017

Wilayah penelitian	Kelompok tani/wanita tani	Jenis komoditas/usaha olahan
Kelurahan Cimahpar	Poktan Tani Jaya	Singkong, pepaya, ubi, jahe merah, timun, jagung, dan bengkuang
	KWT Melati	Manisan (pepaya, salak, pala, dan mangga), kue basah, warung, dan kue kering (lebaran)
Kelurahan Situgede	Poktan Saluyu	Talas, bengkuang, kacang panjang, timun, dan ikan hias
	KWT Sawargi	Cokelat dan dodol
	KWT Geulis	Dendeng belut dan warung
Desa Benteng	Poktan Cahaya	Singkong, jagung, dan ubi
	KWT Puring	Toge, cabe, jahe merah, dan pepaya Jepang
	KWT Benteng Sejahtera	Sebelumnya toge, beralih ke pengolahan, dan warung
Desa Purwasari	Poktan Bina Mekarsari	Padi, katuk, kacang panjang, dan kolam ikan
	Poktan Kramatsari	Pepaya, katuk, jagung, kolam ikan, dan bengkuang
	Poktan Hegarsari	Ubi, kacang panjang, timun, jagung, dan singkong
	Poktan Rawasari	Ubi, singkong, jagung, dan kacang panjang

Tabel 2 Profil petani di Kota dan Kabupaten Bogor, 2017

Profil petani	Kategori	Cimahpar		Situgede		Benteng		Purwasari		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	20	47,6	20	52,6	6	20,7	86	93,5	132	65,7
	Perempuan	22	52,4	18	47,4	23	79,3	6	6,5	69	34,3
Usia	Muda (20–30 th)	2	4,8	1	2,6	6	20,7	4	4,3	13	6,5
	Dewasa (31–50 th)	23	54,8	18	47,4	11	37,9	30	32,6	82	40,8
	Tua (>50 th)	17	40,5	19	50,0	12	41,4	58	63,1	106	52,7
Pendidikan formal	Rendah (TS dan SD)	21	50,0	21	55,3	11	37,9	69	75,8	122	61,0
	Sedang (SLTP)	10	23,8	10	26,3	8	27,6	8	8,8	36	18,0
	Tinggi (SLTA)	11	26,2	7	18,4	10	34,5	14	15,4	42	21,0
Penguasaan lahan	Tidak Punya	22	52,4	6	15,8	16	55,2	18	19,6	62	30,8
	Sempit (1–1,6 ha)	19	45,2	30	78,9	12	41,4	73	79,3	134	66,7
	Sedang (1,7–3,3 ha)	0	0,0	2	5,3	1	3,4	1	1,1	4	2,0
	Luas (3,4–5 ha)	1	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
Penghasilan usaha tani	Tidak Ada	0	0,0	2	8,7	0	0,0	0	0,0	2	1,7
	Rendah (≤8 jt)	17	100,0	21	91,3	5	100,0	71	97,3	114	96,6
	Sedang (9–17 jt)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Tinggi (>18 jt)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,7	2	1,7
Penghasilan non-usaha tani	Tidak Ada	0	0,0	5	14,7	0	0,0	1	1,9	6	4,3
	Rendah (<4 jt)	25	78,1	22	64,7	17	73,9	43	82,7	107	75,9
	Sedang (4–7 jt)	6	18,8	7	20,6	6	26,1	6	11,5	25	17,7
	Tinggi (>8 jt)	1	3,1	0	0,0	0	0,0	2	3,9	3	2,1
Pengeluaran rumah tangga	Rendah (<3 jt)	30	76,9	26	68,4	14	58,3	69	77,5	139	73,2
	Sedang (3–5 jt)	8	20,5	12	31,6	9	37,5	17	19,1	46	24,2
	Tinggi (>5 jt)	1	2,6	0	0,0	1	4,2	3	3,4	5	2,6

baik di Kota maupun Kabupaten Bogor. Berbeda dari petani di Desa Purwasari, Benteng, dan Situgede yang sebagian besar berusia tua adalah sebesar 63,1; 41,4; dan 50%, petani di Kelurahan Cimahpar berada dalam kategori usia dewasa, yaitu berkisar pada 31–50 tahun. Meskipun Kelurahan Cimahpar berada di wilayah perkotaan, pekerjaan dalam kegiatan usaha tani masih diandalkan untuk menopang penghasilan rumah tangga tani.

Dalam hal pendidikan formal, semua petani telah menempuh pendidikan formal meskipun masih tergolong rendah. Hampir semua petani berpendidikan rendah, yaitu tidak tamat hingga tamat SD sebesar 61%. Hanya sebagian kecil petani yang mengenyam pendidikan tinggi setingkat SLTA sebesar 21%. Data ini sejalan dengan Suharyanto *et al.* (2017) yang menemukan rata-rata tingkat pendidikan tertinggi petani setara tamat SD dan SLTP. Hal ini menandakan bahwa kualifikasi petani berpendidikan rendah masih merupakan ciri yang melekat dalam pekerjaan di bidang pertanian, baik di Kota maupun Kabupaten Bogor. Kualifikasi pendidikan yang rendah menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor pertanian tidak memerlukan keahlian atau keterampilan yang khusus. Namun, kenyataan ini menjadikan sektor pertanian sulit berkembang mengingat kemampuan untuk menerapkan inovasi teknologi pertanian menuntut tingkat kemampuan yang memadai pada petani untuk bisa menerima, mengolah, hingga menerapkannya.

Ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan (Suharyanto *et al.* 2017). Lahan menjadi salah satu faktor produksi dalam kegiatan usaha tani yang memberikan sumbangan pada pendapatan rumah tangga tani. Dalam hal penguasaan lahan, hampir semua petani (66,7%) menguasai lahan sempit, yaitu antara 1–1,6 ha. Bahkan, terdapat 30,8% petani yang tidak menguasai lahan sehingga harus menyewa lahan. Hal ini sejalan dengan Irawan *et al.* (2007) yang menemukan bahwa di Jawa terdapat sekitar 13% petani yang tidak memiliki lahan, tetapi mengusahakan lahan orang lain dengan sistem sewa, sakap, atau bagi hasil. Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar petani yang tidak menguasai lahan bertempat tinggal di Kelurahan Cimahpar dan Desa Benteng adalah sebesar 52,4 dan 55,2%. Rendahnya penguasaan lahan oleh petani berkontribusi pada pendapatan rumah tangga tani yang rendah pula. Petani yang menguasai lahan seluas 3,4–5 ha sebesar 0,5%.

Penghasilan petani dari hasil usaha tani tergolong rendah. Sebesar 96,6% petani memperoleh penghasilan dari hasil usaha tani di bawah 8 juta selama setahun musim panen. Bahkan, terdapat 1,7% petani yang tidak memperoleh penghasilan dari usaha tani. Begitu pula, penghasilan di luar usaha tani pun tergolong rendah. Hampir semua petani memperoleh penghasilan di bawah 4 juta, yaitu sebesar 75,9%. Terdapat 4,3% petani yang tidak memperoleh penghasilan di luar usaha tani. Hanya sebagian kecil petani yang memperoleh penghasilan tinggi, baik dari usaha

tani sebesar 1,7% maupun dari luar usaha tani sebesar 2,1%. Dengan penghasilan yang relatif rendah, baik dari usaha tani maupun luar usaha tani, tidak mengherankan pula jika sebagian besar pengeluaran petani tergolong rendah, yaitu sebesar 73,2% di bawah Rp3 juta/bulan. Oleh karena itu, teknik dan pengelolaan dalam kegiatan usaha tani perlu ditingkatkan lebih jauh sehingga penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani tersebut dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga tani.

Kebutuhan Petani terhadap Dukungan Pemerintah dalam Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan

Sampai saat ini dukungan pemerintah dalam mendorong penerapan sistem pertanian berkelanjutan dapat dilihat dalam hal layanan pendidikan dan latihan (diklat) petani tentang pupuk organik, pengendalian hama, penyakit secara hayati, dan layanan konsultasi (penyuluhan) tentang *good agriculture practices* (Kementerian Pertanian RI 2009). Dukungan dalam bentuk penyediaan infrastruktur seperti *green house*, teknologi pascapanen, teknologi pengolahan limbah pertanian, serta sistem informasi pertanian berkelanjutan belum sepenuhnya tersedia. Untuk itu, petani di empat wilayah penelitian diminta menilai kebutuhan terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem berkelanjutan, yaitu pemberian dorongan atau motivasi oleh pemerintah kepada petani responden untuk menerapkan kegiatan usaha tani berkelanjutan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang usaha tani tersebut. Seperti, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak), ketersediaan modal usaha, ketersediaan energi (bahan bakar minyak dan listrik), jaminan harga sarana produksi usaha tani, dan jaminan harga pasar hasil usaha tani.

Tabel 3 memperlihatkan distribusi skor jawaban kebutuhan petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar petani membutuhkan dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan sebagai suatu dukungan yang dirasakan sangat penting, yaitu sebesar 49,2%. Hal ini dapat dimaklumi karena hampir semua petani masih menopang penghasilan dari kegiatan usaha tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan Tabel 3 ketersediaan modal usaha merupakan salah satu di antara dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan yang dibutuhkan oleh sebagian besar petani sebesar 82,1% sebagai dukungan yang sangat penting.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar petani (71,1%) membutuhkan kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak) sebagai suatu dukungan pemerintah yang sangat penting. Demikian halnya, jaminan harga pasar hasil usaha tani (69,7%) dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi (60,7%) menjadi kebutuhan yang dirasakan sangat penting bagi petani untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani.

Utamanya, dalam hal menyediakan akses modal usaha tani bagi petani, memberikan jaminan kelancaran dalam pemasaran hasil usaha tani, memberikan jaminan harga pasar hasil usaha tani dan menyediakan sarana dan prasarana transportasi sebagai bukti nyata pemerintah dalam mendukung penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

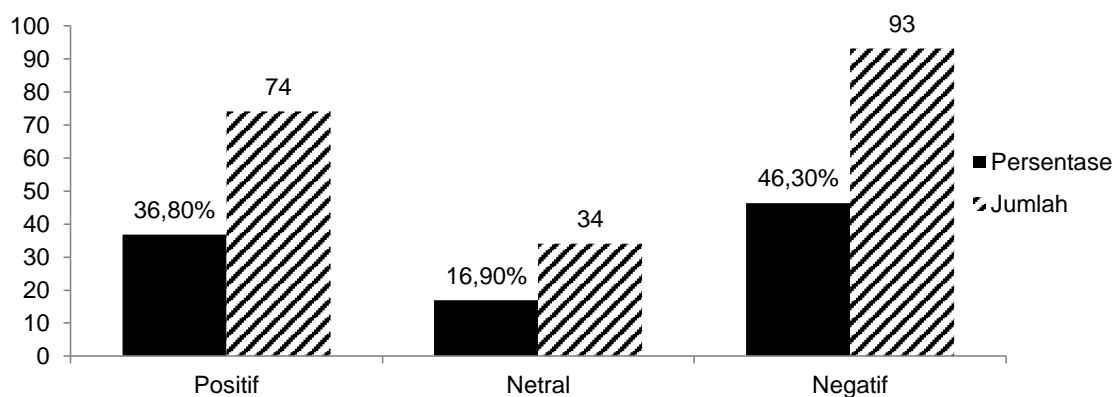
Persepsi Petani terhadap Dukungan Pemerintah dalam Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan

Pada penelitian ini persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan dinilai dari ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak), ketersediaan modal usaha, ketersediaan energi (bahan bakar minyak dan listrik), ketersediaan modal usaha, jaminan harga saprodi usaha tani, dan jaminan harga pasar hasil usaha tani. Gambar 1 memperlihatkan bahwa sebagian petani (46,3%) mempunyai persepsi negatif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Sementara itu, 36,8% petani lainnya mempunyai persepsi positif dan 16,9% petani berpersepsi netral. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya petani responden kurang merasakan dukungan yang berarti dari pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

Adapun Tabel 4 memperlihatkan distribusi skor persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Pada Tabel 4 tampak bahwa sebagian petani memiliki persepsi bahwa pemerintah kurang mendukung penerapan sistem pertanian berkelanjutan, yaitu sebesar 55,7%. Kurangnya dukungan pemerintah dinilai oleh petani dalam hal ketersediaan modal usaha (65,7%), jaminan harga pasar hasil usaha tani (58,7%), jaminan harga sarana produksi usaha tani (51,7%), dan kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak) (50,2%). Modal usaha yang cukup menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan usaha tani berkelanjutan, namun petani menganggap bahwa pemerintah kurang memberikan dukungan dan akses dalam modal usaha tani. Harga pasar yang layak dan terjamin stabil tentunya memberikan kepuasan bagi petani, bahkan menjadi dorongan semangat bagi petani untuk menerapkan usaha tani berkelanjutan, namun petani menilai hal ini kurang mendapat dukungan pemerintah. Harga sarana produksi pertanian berkelanjutan yang senantiasa terjangkau oleh petani menjadi andalan dan penopang kegiatan usaha tani yang berkelanjutan, namun petani menilai bahwa pemerintah masih kurang optimal dalam menyediakan sarana produksi pertanian berkelanjutan yang terjangkau oleh petani. Demikian halnya, kelancaran

Tabel 3 Distribusi skor jawaban kebutuhan petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan di Kota dan Kabupaten Bogor, 2017

Kebutuhan petani	Tidak penting		Kurang penting		Penting		Sangat penting	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Dukungan pemerintah	8	4,0	8	4,0	85	42,7	98	49,2
Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi	2	1,0	26	12,9	51	25,4	122	60,7
Kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak)	6	3,0	9	4,5	42	20,9	143	71,1
Ketersediaan modal usaha	6	3,0	13	6,5	17	8,5	165	82,1
Ketersediaan energi (BBM dan listrik)	20	10,0	30	14,9	56	27,9	95	47,3
Jaminan harga saprodi usaha tani	8	4,0	19	9,5	79	39,3	95	47,3
Jaminan harga pasar hasil usaha tani	8	4,0	14	7,0	39	19,4	140	69,7



Gambar 1 Jumlah dan persentase persepsi petani pada dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan di Kota dan Kabupaten Bogor, 2017.

pemasaran hasil usaha tani yang terjual dengan harga layak tentunya memberikan keuntungan finansial yang layak bagi petani sehingga mendorong keberlanjutan usaha tani. Namun, petani menganggap bahwa pemerintah kurang memberikan dukungan dan akses dalam kelancaran pemasaran hasil usaha tani. Meskipun demikian, Tabel 4 memperlihatkan bahwa petani menilai pemerintah telah memberikan dukungan yang cukup dalam ketersediaan sarana dan prasarana transportasi (41,3%) dan ketersediaan energi (bahan bakar minyak dan listrik) (51,2%). Kedua hal tersebut dipandang telah cukup memenuhi kebutuhan petani yang sangat penting untuk memperoleh dukungan pemerintah.

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Petani terhadap Dukungan Pemerintah dalam Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan

Persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pada penelitian ini beberapa profil petani seperti usia, pendidikan formal, penguasaan lahan, dan penghasilan usaha tani dikorelasikan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Usia dapat memengaruhi persepsi individu. Usia memengaruhi seseorang dalam menginteprestasi dan memberikan makna pada suatu objek. Oleh karena itu, setiap orang dengan usia yang berbeda-beda memberikan penilaian yang berbeda-beda pula terhadap suatu objek. Usia dapat memengaruhi daya tangkap dan pola pikir individu, termasuk dalam merespons stimulus yang diterimanya. Usia menjadi penting dikaji dalam kaitannya dengan pembentukan persepsi karena seiring dengan pertambahan usia seseorang, maka semakin

berkembang pula daya tangkap dan nalarnya. Namun, Tabel 5 memperlihatkan bahwa usia petani tidak berkontribusi nyata dalam pembentukan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan ($r_s = 0,042, P > 0,05$). Temuan ini berbeda dari penelitian Handayani dan Harini (2017) bahwa terdapat pengaruh usia yang nyata pada persepsi petani terhadap multifungsi lahan sawah di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal petani, yaitu usia bukanlah faktor yang berkontribusi dalam pembentukan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Artinya, bertambahnya usia petani tidak menjamin petani mempunyai persepsi positif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pendidikan formal petani berkorelasi signifikan dan lemah, tapi positif dengan persepsi terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan ($r_s = 0,150, P < 0,05$). Temuan ini menguatkan bahwa kualifikasi petani dengan pendidikan formal rendah cenderung menilai kurangnya dukungan pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha tani yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indraningsih (2017) yang menunjukkan adanya hubungan nyata antara pendidikan petani dengan persepsi petani terhadap varietas padi dalam aspek keunggulan teknis. Pendidikan formal memegang peranan penting dalam terbentuknya persepsi seseorang. Pendidikan formal seseorang mencerminkan tingkat pengetahuan seseorang dalam memahami suatu informasi yang diterimanya. Semakin tinggi pendidikan formal seseorang tentunya semakin mudah seseorang menerima dan memahami informasi tersebut. Seseorang yang ber-

Tabel 4 Distribusi skor persepsi petani pada dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan di Kota dan Kabupaten Bogor, 2017

Persepsi	Tidak mendukung		Kurang mendukung		Cukup mendukung		Sangat mendukung	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Dukungan pemerintah	21	10,4	112	55,7	66	32,8	2	1,0
Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi	14	7,0	41	20,4	83	41,3	63	31,3
Kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak)	28	13,9	101	50,2	58	28,9	13	6,5
Ketersediaan modal usaha	28	13,9	132	65,7	35	17,4	6	3,0
Ketersediaan energi (BBM dan listrik)	26	12,9	32	15,9	103	51,2	40	19,9
Jaminan harga saprodi usaha tani	27	13,4	104	51,7	67	33,3	3	1,5
Jaminan harga pasar hasil usaha tani	35	17,4	118	58,7	47	23,4	1	0,5

Tabel 5 Korelasi antara profil petani dengan persepsi terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan

Profil petani	Persepsi terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan	
	R_s	P
Usia	0,042	0,555
Pendidikan formal	0,150*	0,034
Penguasaan lahan	- 0,154*	0,030
Penghasilan usaha tani	- 0,078	0,271

pendidikan formal tinggi dianggap mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi pula sehingga mampu mengolah informasi yang diterimanya.

Penguasaan lahan bagi petani merupakan syarat mutlak dalam melaksanakan kegiatan usaha tani berkelanjutan. Lahan berperan penting bagi keberlangsungan hidup dan memiliki manfaat, baik secara individual maupun komunal (Handayani & Harini 2017). Indraningsih (2017) menambahkan bahwa lahan tidak hanya memiliki peran dan fungsi strategis, melainkan juga mempunyai nilai-nilai ekonomi dan sosial. Lahan menjadi salah satu faktor produksi dalam kegiatan usaha tani yang memberikan sumbangan pada pendapatan rumah tangga. Semakin luas penguasaan lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha tani, maka akan semakin tinggi pula hasil produksi usaha tani (Aditiawati *et al.* 2014). Tingginya hasil produksi usaha tani selanjutnya memungkinkan petani memperoleh pendapatan yang besar guna melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, penguasaan lahan yang luas oleh petani juga mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan petani sehingga ada kecenderungan bahwa petani yang menguasai lahan yang luas identik dengan status sosial rumah tangga yang tinggi pula.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa penguasaan lahan oleh petani berkorelasi signifikan dan lemah, tetapi negatif dengan persepsi terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan ($r_s = -0,154$, $P < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya luas lahan yang dikuasai oleh petani dan cenderung menilai kurangnya dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan luas lahan yang semakin besar dikuasai oleh petani memerlukan modal usaha yang besar pula dalam pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan usahanya. Kurangnya modal usaha yang didukung oleh pemerintah menyebabkan petani meragukan kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Temuan ini berbeda dari laporan Indraningsih (2017) yang menemukan hubungan nyata antara luas kepemilikan lahan dengan persepsi petani terhadap varietas padi dalam aspek keunggulan teknis. Sehubungan dengan keunggulan teknis varietas padi dapat mengurangi biaya usaha tani sehingga petani dengan kepemilikan lahan yang luas cenderung merasakan manfaat dalam penggunaan varietas padi.

Penghasilan usaha tani merupakan besaran pendapatan yang diperoleh petani dari kegiatan usaha tani. Besarnya penghasilan usaha tani tidak hanya berguna untuk kelangsungan hidup rumah tangga tani, melainkan juga menjadi modal usaha yang memungkinkan keberlanjutan usaha tani. Besarnya penghasilan usaha tani juga mencerminkan tingkat kesejahteraan petani sehingga penghasilan tani yang tinggi identik dengan status sosial petani yang tinggi pula. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi status sosial petani, maka semakin kosmopolit petani tersebut. Petani yang kosmopolit cenderung terbuka dan mudah menerima informasi baru yang membentuk

pandangannya terhadap sesuatu hal. Namun, Tabel 5 memperlihatkan bahwa penghasilan usaha tani tidak berkorelasi nyata dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan ($r_s = -0,078$, $P > 0,05$). Meski begitu, arah yang berlawanan menunjukkan bahwa petani dengan penghasilan tinggi cenderung merasakan kurangnya dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

Dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi pada pembentukan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan adalah pendidikan formal dan luas penguasaan lahan yang merupakan faktor eksternal. Karena itu, upaya pembentukan persepsi petani yang positif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan dilakukan dengan penekanan pada faktor-faktor yang ada di luar diri petani. Dalam hal ini, kemudahan akses bagi petani dalam memperoleh pendidikan formal menjadi penting dalam membentuk persepsi petani yang positif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Daya nalar dan pengetahuan yang tinggi pada petani memungkinkan petani memiliki kemampuan dalam mengolah informasi yang diterimanya, khususnya informasi yang berkaitan dengan penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Demikian halnya, kemudahan akses dalam memperoleh modal usaha tani dan sarana produksi pertanian berkelanjutan bagi petani yang menguasai lahan luas menjadi penting dalam upaya pembentukan persepsi petani yang positif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Modal usaha tani dan sarana produksi pertanian berkelanjutan yang mudah diakses dan dijangkau petani memungkinkan petani mengelola lahannya yang luas dengan sistem pertanian berkelanjutan tanpa menimbulkan kerugian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian petani mempunyai persepsi yang negatif terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Petani memandang dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam hal ketersediaan modal usaha, kelancaran pemasaran (terjual dengan harga layak), jaminan harga pasar hasil usaha tani, dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Namun, petani menilai bahwa berbagai kebutuhan tersebut kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan adalah pendidikan formal dan luas penguasaan lahan. Pendidikan formal petani berkorelasi positif dengan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan, akan tetapi luas

penguasaan lahan berkorelasi negatif. Dapat direkomendasikan bahwa a) Pemerintah setempat dapat mengembangkan kebijakan dan program pertanian berkelanjutan di tingkat desa/ kelurahan yang mendukung aspek sosial (organisasi petani), ekonomi, dan infrastruktur perdesaan/ pertanian dan b) Pemerintah setempat perlu memberikan akses pendidikan formal dan kemudahan dalam memperoleh modal usaha tani dan sarana produksi pertanian berkelanjutan guna membentuk persepsi yang positif pada petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan setinggi-tingginya kepada Kemenris-tekdiikti atas bantuan dana Hibah PTUPT 2017 sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawati P, Rosmiati M, Sumardi D. 2014. Persepsi Petani terhadap Inovasi Teknologi Pestisida Nabati Limbah Tembakau. *Sosiohumaniora*. 16(2): 184–192.
- Agromaret. 2017. Lima Manfaat dan Dampak Positif Pertanian Berkelanjutan. [internet]. [diunduh pada 18 Oktober 2017]. Tersedia pada: <https://blog.agromaret.com/2017/10/5-manfaat-dan-dampak-positif-pertanian>
- Baron RA, Brascombe N. 2014. *Social Psychology*. Thirteenth Edition. England (EN): Pearson.
- Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian Republik. 2014. Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan; Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan. Jakarta (ID): Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015–2045.
- Bogor Butuh Penyuluh Pertanian. 2016. [internet] [diunduh pada 27 Februari 2018]. Tersedia pada: <https://republika.co.id/berita/koran/urbana/16/04/26/o68js58-bogor-butuh-penyuluh-pertanian>
- Handayani HN, Harini R. 2017. Persepsi Petani tentang Multifungsi Lahan Sawah dan Pengaruhnya terhadap Konversi Lahan di Pedesaan dan Pinggiran Kota. *Jurnal Bumi Indonesia*. 6(4): 2–10.
- Hayati, Amanah S, Hubeis AV, Tjitropranoto P. 2015. Kemampuan Perempuan Tani dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Sosiohumaniora*. 18(3): 229–235.
- Indraningsih KS. 2017. Persepsi Petani terhadap Inovasi Teknologi Padi. [internet]. [diunduh pada 18 Oktober 2017]. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/732-ID-persepsi-petani-terhadap-inovasi-teknologi-padi.pdf>
- Indraningsih KS. 2017. Strategi Diseminasi Inovasi Pertanian dalam Mendukung Pembangunan Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 35(2).
- Irawan, Simatopang BP, Sugiarto, Supadi, Sinuraya JF, Ariani M, Bastuti T, Sunarsih, Iqbal M, Darwis V, Muslim C, Nurasah T, Elizabeth R, dan Kustari R. 2007. Panel Petani Nasional (Patanas): Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor (ID).
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2009. Inovasi Teknologi Bawang Merah Berbasis *Good Agri-culture Practices*. Perpustakaan Digital Badan Litbang Pertanian. [internet]. [diunduh pada 16 Oktober 2017]. Tersedia pada: http://perpustakaan.pertanian.go.id/simpertan_litbang/index.php/katalog/buku/l/inovasi-teknologi-bawang-merah-berbasis-good-agruculture-practices-gap/0/0/2009
- Peraturan Menteri Pertanian, Perundangan Pertanian. [internet]. [diunduh pada 16 Oktober 2017]. Tersedia pada: <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/SK-273-07.pdf>
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian. 2017. Statistik Indikator Makro Sektor Pertanian. 9(4). Triwulan IV. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta. [internet]. [diunduh pada 16 Oktober 2017]. Tersedia pada: <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/download/file/367-statistik-pertanian-2017>
- Rakhmat J. 2007. *Persepsi dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta (ID): Rajawali Press.
- Ramli R. 2012. Beberapa Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Tidak Tuntasnya Penerapan Inovasi Teknologi oleh Petani Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. Dalam *Prosiding Seminar Nasional: Petani dan Pembangunan Pertanian*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor (ID).
- Renstra 2013–2018 BKP5K Kabupaten Bogor. 2014 [internet]. [diunduh pada 27 Februari 2018]. Tersedia pada: <https://bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana%20Strategis%2>
- Robbins SP. 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta (ID): Erlangga.
- Siata R. 2016. Faktor-faktor yang Memengaruhi Petani dalam Penerapan Benih Padi Varietas Ciherang di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu. *Sosiohumaniora*. 18(3): 240–247.
- Syaifudin TMG. 2017. Indonesia Kekurangan 28.000 Penyuluh Pertanian. [internet]. [diunduh pada 8 Maret 2018]. Tersedia pada <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/09/190000126/indonesi-a-kekurangan-28.000-penyuluh-pertanian>